

Ringkasan

Maftuhul Faizin, NIM 202102020111. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 di Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek (Studi Kebijakan Pemberian Hibah). Pembimbing I: Dr. Imam Fachruddin, M.Si, Pembimbing II: Dr. Teguh Pramono, M.Si

Hibah sebagai bagian dari APBD Kabupaten Trenggalek harus dilaksanakan dengan prinsip anggaran berbasis kinerja. Hibah memberi peran lebih besar kepada masyarakat untuk menjadi subyek pembangunan. Hibah merupakan wujud kolaborasi pemerintah dengan organisasi lain untuk mewujudkan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kinerja implementasi kebijakan daerah yang tertuang dalam APBD, khususnya hibah daerah diwujudkan dengan adanya prinsip kemanfaatan kepada masyarakat. Hibah ditujukan untuk pencapaian sasaran urusan pemerintah daerah maupun untuk urusan pemerintahan umum. Sekretariat Daerah sebagai pelaksana hibah untuk urusan pemerintahan umum mendapat tantangan untuk menjelaskan keterkaitan pemberian hibah dengan manfaat bagi pembangunan daerah. Penelitian ini akan mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan hibah yang tertuang dalam APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 di Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data dengan menggunakan model interaktif Miles Huberman yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data menggunakan sumber data wawancara mendalam, kajian dokumen dan observasi.

Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang APBD Tahun Anggaran 2022, khususnya terkait kebijakan pemberian hibah di Sekretariat Daerah pada Tahun 2022 belum berjalan dengan baik. Temuan itu didasarkan pada pengamatan dalam empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai berikut: komunikasi berjalan dengan baik meskipun belum mampu memperbaiki ego sektoral antar perangkat daerah maupun unit kerja, sumber daya manusia cukup kompeten, namun terdapat kebutuhan untuk kompetensi khusus, peraturan yang mendasari cara melaksanakan kebijakan hibah belum diperbarui, wewenang didasari oleh Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Perbup Nomor 54 Tahun 2019 serta diperkuat dengan pembentukan tim verifikasi, sarana prasarana mengandalkan inventaris Bagian Kesra, anggaran mengandalkan penyediaan oleh TAPD, disposisi pelaksana cukup baik namun dalam perencanaan cenderung resisten, dan struktur birokrasi terkendala pembagian tugas yang kurang jelas dan SOP belum tersusun paska Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Faktor komunikasi dan sumber daya manusia mendukung implementasi kebijakan, sedangkan faktor pembagian tugas menjadi penghambat utama yang

berhubungan dengan faktor penghambat lain seperti informasi tugas dan fungsi yang ambigu, tidak tersedianya sumber daya manusia dengan kompetensi khusus, dan disposisi pelaksana pada tahapan perencanaan kurang baik. Selain itu, ketersediaan anggaran ditentukan pada akhir perencanaan.

Kata kunci: Implementasi, Hibah daerah.

Summary

Maftuhul Faizin, NIM 202102020111. Implementation of Trenggalek Regency Regulation Number 10 of 2021 concerning Local Government Budget for Fiscal Year 2022 at the Trenggalek Regency Secretariat (Grant Policy Study). Supervisor I: Dr. Imam Fachruddin, M.Si, Supervisor II: Dr. Teguh Pramono, M.Si

Grants as part of the Trenggalek Local Government Budget must be implemented with the principle of performance-based budgeting. Grants give greater role to communities to be the subject of development. Grants are a form of government collaboration with other organizations to realize development in order to realize people's welfare. The performance of regional policy implementation contained in the Local Government Budget, especially grants, is realized by the principle of benefit to the community. Grants are intended for the achievement of local government affairs goals as well as for general government affairs. The Regional Secretariat as the implementer of grants for general government affairs is challenged to explain the relationship between grant provision and benefits for regional development. This study will describe the factors that affect the implementation of grant policies contained in the 2022 Trenggalek Local Government Budget at the Trenggalek Regional Secretariat.

This research uses qualitative research methods with a case study approach. Data analysis techniques using Miles Huberman's interactive model include four stages, namely data collection, data condensation, data display and conclusions. Data collection using in-depth interview data sources, document review and observation.

The results of the study found that the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning the 2022 Local Government Budget, especially related to granting policies at the Regional Secretariat in 2022 has not gone well. The findings are based on observations in four factors that affect policy implementation as follows: communication is running well even though it has not been able to improve sectoral egos between government agencies and units, human resources are quite competent, but there is a need for special competencies, the regulations underlying how to implement the grant policy have not been updated, the authority is based on Regulation of Minister of Home Affairs Number 77 of 2020 and Regulation of Regent Number 54 of 2019 and strengthened by the formation of a verification team, infrastructure relies on the inventory of the People Welfare Section, the budget relies on provision by Local Government Budget Team, the disposition of implementers is quite good but in planning tends to be resistant, and the bureaucratic structure is constrained by the unclear division of tasks and the SOP has not been compiled after Regulation of Minister of Home Affairs Number 77 of 2020.

Communication and human resources factors support policy implementation, while the division of tasks factor is the main inhibitor which is

related to other inhibiting factors such as ambiguous information on tasks and functions, the unavailability of human resources with special competencies, and the disposition of implementers at the planning stage is not good. In addition, budget availability is determined at the end of planning.

Keyword: Implementation, Grant.